

PETUNJUK OPERASIONAL (PO) KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023

A. PETUNJUK UMUM

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Organisasi | : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 2. Program | : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| 3. Nama Kegiatan | : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
| 4. Sifat Kegiatan | : Lanjutan |
| 5. Bagian Belanja | : Belanja Langsung |
| 6. Jumlah Biaya Kegiatan | : Rp. 190.016.394,00 |
| 7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan | : Januari s.d. Desember 2023 |
| 8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | |
| a. Nama | : JOKO PRIHANTORO, ST |
| b. Jabatan | : Fungsional Penata Ruang Ahli Muda |
| 9. Bendahara | |
| a. Nama | : RISING NOFRIANTO |
| b. Jabatan | : Staf Dinas PUTR |
| 10. Lokasi Kegiatan | : Kabupaten Pesisir Selatan |
| 11. Tolak ukur indikator | |
| a. Masukan | |
| - Jumlah Dana | : Rp. 190.016.394,00 |
| - Waktu Pelaksana | : Januari s.d. Desember 2023 |
| b. Keluaran dan Hasil | |
| | : 1. Menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan; |
| | 2. Menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR |
| | 3. Terlaksananya Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rencana tata ruang dibawahnya (RDTRK, RTBL dll) |
| | 4. Terciptanya keterpaduan program sektoral dan berkurangnya potensi konflik ruang dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. |

5. Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Pesisir Selatan.
 6. Adanya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholders dalam Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pesisir Selatan.
 7. Adanya penyebaran informasi tentang data yang berkaitan pemanfaatan ruang dan bangunan.
 8. Masyarakat memiliki ruang publik yang humanis, aman, nyaman, murah dan ramah lingkungan.
 9. Memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
 10. Terdatanya Kawasan hutan yang akan diturunkan statusnya menjadi areal penggunaan lain.
-
12. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 sebagai berikut:

1/19/23, 9:40 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023												
Urusan	:	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Unit Organisasi	:	1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
Sub Unit Organisasi	:	1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
Program	:	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										
Kegiatan	:	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										
Sub Kegiatan	:	1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang										
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi Kegiatan	:											
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember										
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat										
Jumlah 2022	:	Rp. 0										
Jumlah 2023	:	Rp. 190.016.394										
Jumlah 2024	:	Rp. 5.000.000										
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja												
Indikator	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran							
	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja					
Capaian Program	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukannya				66.67 persen		Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukannya				66.67 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 159.508.594		Dana yang dibutuhkan				Rp. 190.016.394	
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				12 Dokumen		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				12 Dokumen	
Hasil	Indek Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR)				0		Indek Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR)				0	
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					159.508.594					190.016.394	30.507.80
5.1	BELANJA OPERASI					134.971.004					187.534.434	52.563.43
5.1.01	Belanja Pegawai					6.600.000					0	(6.600.00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.600.000					0	(6.600.00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.600.000					0	(6.600.00)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.600.000					0	(6.600.00)
	[#] Honorarium Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.600.000					0	(6.600.00)
	[-]											
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Pagu 100-250 jt	12 Orang / Bulan	OB	550.000	0	6.600.000	00 Orang / Bulan	OB	550.000	0	0	(6.600.00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					128.371.004					187.534.434	59.163.43
5.1.02.01	Belanja Barang					9.191.004					22.964.434	13.773.43
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.191.004					22.964.434	13.773.43
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.693.304					2.563.434	(129.87)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.693.304					2.563.434	(129.87)
	[-]											
	Anak Hecter No.10-1M Max Spesifikasi : Isi : 1000 Pcs	2 Kotak	Kotak	56.277	0	112.554	2 Kotak	Kotak	56.277	0	112.554	
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : besar / 260	4 Kotak	kotak	29.970	0	119.880	4 Kotak	kotak	29.970	0	119.880	
	Kertas Kuarto HVS 70 gr	8 Rim	Rim	57.165	0	457.320	10 Rim	Rim	57.165	0	571.650	114.33

<https://pesirsiselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?fMxSS950K7MEYfBxVGOKCebJ2ID4sCdBLRygeEqsshNSjeQEpfjtCRr6bKcSgn0...> 1/6

1/19/23, 9:40 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar												
	Stop Folio Bintang Tiga Spesifikasi : Ukr 27 X 43 X 8 cm	3 Pak	PAK	122.100	0	366.300	1 Pak	PAK	122.100	0	122.100	(244.200)	
	Tinta EPSON 001 Yellow Spesifikasi :	2 Buah	Buah	194.250	0	388.500	2 Buah	Buah	194.250	0	388.500		
	Tinta EPSON 664 Black Spesifikasi :	5 Buah	Buah	138.750	0	693.750	5 Buah	Buah	138.750	0	693.750		
	Tinta EPSON 664 Cyan Spesifikasi :	2 Buah	Buah	138.750	0	277.500	2 Buah	Buah	138.750	0	277.500		
	Tinta EPSON 664 Magenta Spesifikasi : Epson L100,110,200,210,300 350 355	2 Buah	Buah	138.750	0	277.500	2 Buah	Buah	138.750	0	277.500		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.062.500						5.001.000	2.938.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.062.500						5.001.000	2.938.500
	[-]												
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	8250 Eksemplar	eksemplar	250	0	2.062.500	20004 Eksemplar	eksemplar	250	0	5.001.000	2.938.500	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.435.200						15.400.000	10.964.800
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.435.200						15.400.000	10.964.800
	[-] Sosialisasi Tora Kehutanan												
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	144 Porsi	Porsi/org	19.800	0	2.851.200	500 Porsi	Porsi/org	19.800	0	9.900.000	7.048.800	
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	144 Kotak	Porsi/org	11.000	0	1.584.000	500 Kotak	Porsi/org	11.000	0	5.500.000	3.916.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					34.650.000						40.000.000	5.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					34.650.000						40.000.000	5.350.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					34.650.000						0	(34.650.000)
	[#] Honorarium Tim Forum Penataan Ruang Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					34.650.000						0	(34.650.000)
	[-]												
	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Spesifikasi : Ketua	34.65 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	34.650.000	00 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	0	(34.650.000)	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					0						40.000.000	40.000.000
	[#] Belanja Pegawai Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						40.000.000	40.000.000
	[-]												
	Operator Pemetaan (GIS) Spesifikasi : Non ASN		OB	0	0	0	30 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	30.000.000	30.000.000	
	Tenaga Administrasi/Operator Spesifikasi : Non ASN		OB	0	0	0	10 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	10.000.000	10.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					84.530.000						124.570.000	40.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					84.530.000						124.570.000	40.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					84.530.000						68.800.000	(15.730.000)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					42.770.000						27.040.000	(15.730.000)
	[-] Bukittinggi (Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum)												
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Parangjati, Kabupaten	12 Orang / Hari	OH	225.000	0	2.700.000	10 Orang / Hari	OH	225.000	0	2.250.000	(450.000)	

<https://pesirsirselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?fMxSS950K7MEYFbXVGOKCebJ2ID4sCdBLRygeEqsshNSjeQEpfjtICRr6bKcSgn0...> 2/6

1/19/23, 9:40 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II											
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	14 Orang / Hari	OH	250.000	0	3.500.000	10 Orang / Hari	OH	250.000	0	2.500.000	(1.000.000)
[-] Koordinasi												
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box	10 Orang / Hari	OH	300.000	0	3.000.000	8 Orang / Hari	OH	300.000	0	2.400.000	(600.000)
[-] Koordinasi & Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum												
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box	10 Orang / Hari	OH	300.000	0	3.000.000	8 Orang / Hari	OH	300.000	0	2.400.000	(600.000)
[-] Padang (Koordinasi dan sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum)												
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	10 Orang / Hari	OH	225.000	0	2.250.000	8 Orang / Hari	OH	225.000	0	1.800.000	(450.000)
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	10 Orang / Hari	OH	250.000	0	2.500.000	8 Orang / Hari	OH	250.000	0	2.000.000	(500.000)
[-] Painan - Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Sawahlunto												
	BBM Spesifikasi : Pertalite	371 Liter	liter	10.000	0	3.710.000	200 Liter	liter	10.000	0	2.000.000	(1.710.000)
	BBM Spesifikasi : Dexlite	300 Liter	liter	17.450	0	5.235.000	200 Liter	liter	17.450	0	3.490.000	(1.745.000)
[-] Payakumbuh (Koordinasi dan sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum)												
	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50	8 Orang / Hari	OH	250.000	0	2.000.000	8 Orang / Hari	OH	250.000	0	2.000.000	

<https://pesirselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?fMxSS950K7MEYFbXVGOKCebJ2ID4sCdBLRygeEqsshNSjeQEpvtjCRr6bKcSgn...> 3/6

1/19/23, 9:40 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kota, dan Kota Payakumbuh Spesifikasi : Golongan II											
	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan Kota Payakumbuh Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	10 Orang / Hari	OH	300.000	0	3.000.000	8 Orang / Hari	OH	300.000	0	2.400.000	(600.000)
	[-] Perjalanan Dinas Koordinasi											
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	25 Orang / Hari	OH	225.000	0	5.625.000	8 Orang / Hari	OH	225.000	0	1.800.000	(3.825.000)
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	25 Orang / Hari	OH	250.000	0	6.250.000	8 Orang / Hari	OH	250.000	0	2.000.000	(4.250.000)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					41.760.000						41.760.000
	[-]											
	biaya transport lokal Spesifikasi : ke bandara dan sebaliknya	6 Hari	Hari	800.000	0	4.800.000	6 Hari	Hari	800.000	0	4.800.000	
	[-] Jakarta											
	DKI Jakarta Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi	12 Orang / Hari	OH	530.000	0	6.360.000	12 Orang / Hari	OH	530.000	0	6.360.000	
	Penginapan (Pejabat Ess II/b) Spesifikasi : DKI Jakarta	3 Orang / Hari	OH	1.200.000	0	3.600.000	3 Orang / Hari	OH	1.200.000	0	3.600.000	
	Penginapan (Pejabat Ess III/Gol IV) Spesifikasi : DKI Jakarta	8 Orang / Hari	OH	800.000	0	6.400.000	8 Orang / Hari	OH	800.000	0	6.400.000	
	Penginapan (Pejabat Ess IV/Gol III) Spesifikasi : DKI Jakarta	8 Orang / Hari	OH	700.000	0	5.600.000	8 Orang / Hari	OH	700.000	0	5.600.000	
	Tiket Pesawat Spesifikasi : Padang – Jakarta	6 Orang / pp	pp	2.500.000	0	15.000.000	6 Orang / pp	pp	2.500.000	0	15.000.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0						55.770.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						55.770.000
	[-]											

<https://pesisirselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?fmXSS950K7MEYFbXVGOKCebJ2ID4sCdBLRygeEqsshNSjeQEpvfjtCRr6bKcSgn0...> 4/6

1/19/23, 9:40 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV		OH	0	0	0	70 Orang / Hari	OH	125.000	0	8.750.000	8.750.000	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III		OH	0	0	0	70 Orang / Hari	OH	115.000	0	8.050.000	8.050.000	
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II		OH	0	0	0	68 Orang / Hari	OH	100.000	0	6.800.000	6.800.000	
	BBM Spesifikasi : Pertalite		liter	0	0	0	369 Liter	liter	10.000	0	3.690.000	3.690.000	
	BBM Spesifikasi : Dexlite		liter	0	0	0	400 Liter	liter	17.450	0	6.980.000	6.980.000	
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti, Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV		OH	0	0	0	50 Orang / Hari	OH	115.000	0	5.750.000	5.750.000	
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti, Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III		OH	0	0	0	80 Orang / Hari	OH	100.000	0	8.000.000	8.000.000	
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti, Spesifikasi : Golongan II		OH	0	0	0	50 Orang / Hari	OH	85.000	0	4.250.000	4.250.000	
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box		OH	0	0	0	11 Orang / Hari	OH	300.000	0	3.300.000	3.300.000	
5.2	BELANJA MODAL					24.537.590						2.481.960	(22.055.631)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					24.537.590						2.481.960	(22.055.631)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					24.537.590						2.481.960	(22.055.631)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					24.537.590						2.481.960	(22.055.631)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					0						2.481.960	2.481.960
	# Belanja Alat Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						2.481.960	2.481.960
	[-]												
	SSD NVMe ADATA SX6000 Pro 1TB Spesifikasi :		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	2.481.960	0	2.481.960	2.481.960	
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					24.537.590						0	(24.537.590)
	# Belanja Pengadaan Peralatan Jaringan Data dan Vicon Bidang Tata Ruang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.537.590						0	(24.537.590)
	[-]												
	wifi Spesifikasi :	9.815036 Paket	Paket	2.500.000	0	24.537.590	00 Paket	Paket	2.500.000	0	0	(24.537.590)	
Grand Total :						159.508.594	Grand Total :					190.016.394	30.507.800

Kabupaten Pesisir Selatan

<https://pesisirseltankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?fmXSS950K7MEYFbXVGOKCebJ2ID4sCdBLRygeEqsshNSjeQEpvjtICRr6bKcSgn0...> 5/6

1/19/23, 9:40 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T.,M.M
NIP. 197201011997011001

B. PETUNJUK KHUSUS

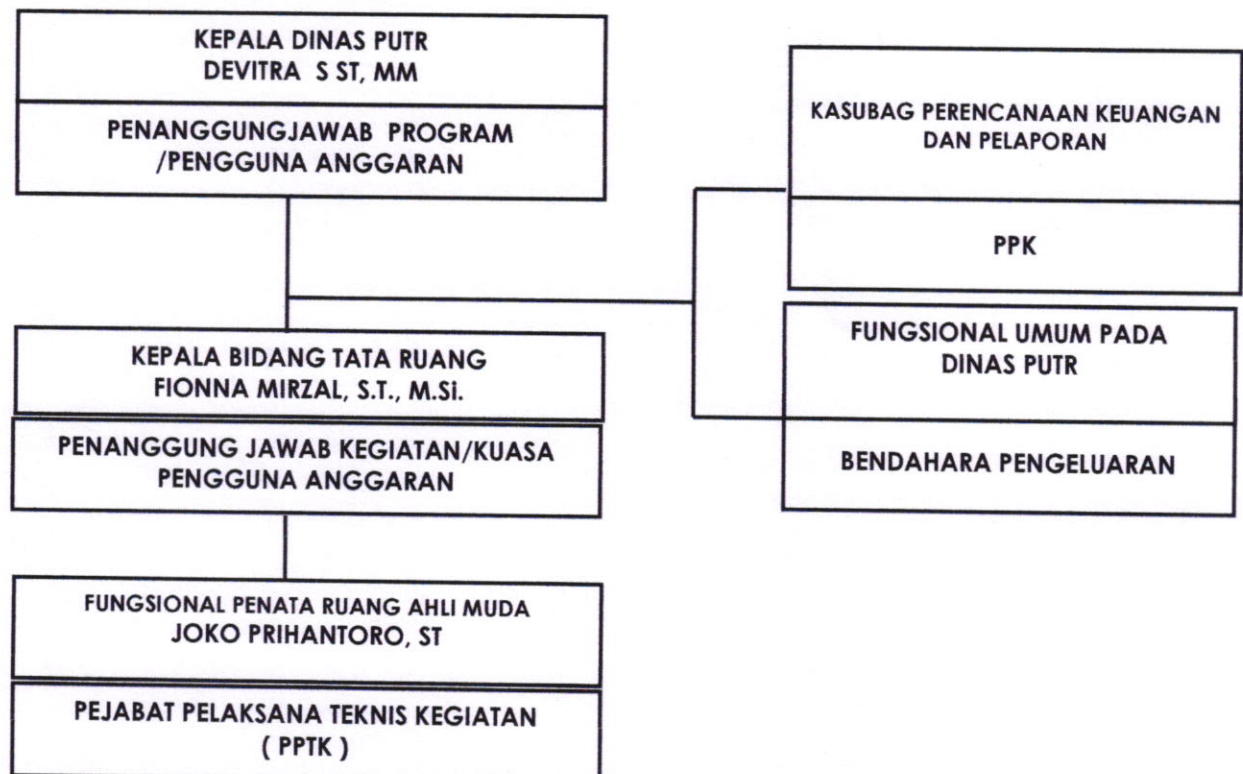
1. TUJUAN :

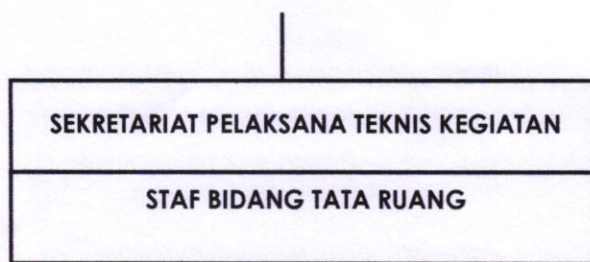
- a. Sebagai pedoman administrasi kegiatan dan keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan .
- b. Acuan bagi PPTK dan KPA dalam penyelenggaraan kegiatan .

2. STRUKTUR ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

=====





DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47391, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Permen ATR /BPN Nomor 13 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing – masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala OPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup OPD dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program / kegiatan.
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA – OPD tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Mempertanggung jawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran.
7. Menandatangani SPM.
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD.
9. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD.
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Bidang Tata Ruang), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-OPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakkan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali / kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala OPD.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubag atau Staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

- 1 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan .
- 2 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- 3 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat / ditetapkan oleh Kepala OPD yang bertanggung jawab kepada Kepala OPD, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, dengan tugas sebagai berikut :

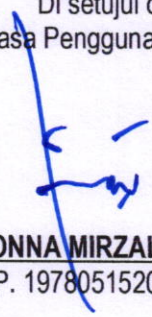
- 1 Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang / Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.
- 2 Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- 3 Melakukan verifikasi SPP.
- 4 Menyiapkan SPM.
- 5 Melakukan verifikasi dan penerimaan
- 6 Melaksanakan akuntansi OPD
- 7 Menyampaikan laporan keuangan OPD.

e. Bendahara Pengeluaran

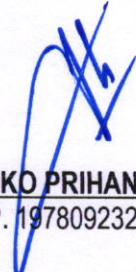
- 1 Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
- 2 Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
- 3 Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran / Kuasai PPTK Pengguna Anggaran.
- 4 Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-OPD.
- 5 Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
- 6 Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatangani serta meneruskan kepada PPK-OPD.
- 7 Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
- 8 Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
- 9 Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
- 10 Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
- 11 Menandatangani Register Penutupan Kas.
- 12 Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di setuju oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran


FIONNA MIRZAL, ST, M.Si
NIP. 197805152006042021

Di buat oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


JOKO PRIHANTORO, ST
NIP. 197809232009021003

Di ketahui oleh:
An. Bupati Pesisir Selatan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


DEVITRA S, ST, MM
NIP. 197201011997011001